

**TINJAUAN YURIDIS PENENTUAN KEADAAN INSOLVENSI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI



**Oleh
Hesti Br Ginting**

194005006

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**TINJAUAN YURIDIS PENENTUAN KEADAAN INSOLVENSI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Hesti Br Ginting

1940050065



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan di era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani dan pancasila pada tahun 2030.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hesti Br Ginting
NIM : 1940050065
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul *Tinjauan Yuridis Penentuan Keadaan Insolvensi dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU* adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, Februari 2023



Hesti Br Ginting



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh

Nama : Hesti Br Ginting
NIM : 1940050065
Program Studi : Hukum
Permintaan/ Program Kekhususan : Hukum Kepailitan
Judul : *Tinjauan Yuridis Penentuan Keadaan
Insolvensi dalam Undang-Undang No.37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, Febuari 2023
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Rr Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
(NIDN: 0327046303)

Pembimbing II

Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.
(NIDN:0320128201)

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
(NIDN: 0327046303)



Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.
(NIDN:0302117904)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 08 Februari 2023 telah diselenggarakan sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Hesti Br Ginting
NIM : 1940050065
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Permintaan/ Program Kekhususan : Hukum Kepailitan
Judul : *Tinjauan Yuridis Penentuan Keadaan Insolvensi dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	Dr.Rr Ani Wijayati, S.H.,M.Hum.	Ketua	
2.	Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H.,M.H.	Anggota	
3.	Dr. Hendri Jayadi Pandiangan S.H.,M.H	Anggota	

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PENENTUAN KEADAAN INSOLVENSI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG

Skripsi
Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Hesti Br Ginting
Nim : 1940050065
Program Kekhususan : Hukum Kepailitan

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 08, Februari
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama



(Dr.Rr Ani Wijayati, S.H.,M.Hum.)

Pembimbing Pendamping



(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H.,M.H)

Anggota Tim Penguji



(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H.,M.H)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesti Br Ginting

NIM : 1940050065

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : Tinjauan Yuridis Penentuan Keadaan Insolvensi dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 14
Februari 2023
Yang menyatakan



Hesti Br Ginting

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segala berkat dan rahmat-Nya dalam menuntun Penulis selama melakukan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Penentuan Keadaan Insolvensi Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat administrasi menyelesaikan pendidikan tinggi dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Adapun tujuan disusunnya skripsi ini, yaitu untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap Debitor yang telah dinyatakan pailit tetapi masih mempunyai nilai aset lebih besar dari pada utangnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan asas Insolvensi dalam pembaharuan hukum Kepailitan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis tidak akan lupa terhadap orang-orang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis dalam melaksanakannya pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan beliau yang menjadi gambaran

- kepada Penulis dalam menjalankan segala pekerjaannya serta beliau yang menjadi motivasi penulis untuk lebih semangat untuk berjuang.
3. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum Dosen Pembimbing Utama Penulis yang telah membimbing Penulis untuk lebih giat dalam pengerjaan skripsi ini dan selalu mendukung Penulis ketika Penulis merasa kehilangan arah dan rela pulang lebih dari jam kerja serta memberikan motivasi kepada Penulis untuk tetap menyelesaikan skripsi ini.
 4. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II Penulis, yang telah membimbing Penulis untuk lebih giat dalam pengerjaan skripsi ini, dan Beliau tetap memberikan dan meluangkan waktu ditengah kesibukan yang begitu padat dan tetap tersenyum serta memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Bapak Leorensius Ginting dan Ibunda Pristianan Tarigan serta Ersada Ginting dan Ibunda Nurintan Surbakti, Untuk Keempat Orangtua Penulis yang Penulis kasihi yang telah membesarkan Penulis, serta memberikan Penulis dorongan dan selalu mendoakan Penulis untuk selalu berjuang dalam menempuh pendidikan.
 6. Haganta Ginting, Fransisco, Yolanda Evehulisa, Lourdes Thorino, Debina, Galish Nicoles, Zevanya Namorika, Iesha Abigail, Ratu Elnora, selaku adik-adik Penulis yang menjadi motivasi terbesar Penulis untuk lebih giat dalam menulis skripsi ini.
 7. Vincentius Lumban Gaol, selaku patner yang solid, dia yang dari Tuhan ataupun tidak buat Penulis di kemudian hari, Penulis tetap mengucapkan syukur dan berterimakasih bisa bertemu, telah menjadi pendengar yang baik, dan selalu siap menempuh jauhnya bimbingan skripsi, serta siap untuk saling bertukar ilmu dan selalu memastikan Penulis baik-baik saja.
 8. FDIH FH UKI, selaku organisasi yang memberi Penulis naungan menjadi manusia yang lebih berani berbicara, serta menuangkan ide dan gagasan

lewat tulisan, terimakasih karena dari ini Penulis bisa merasakan Best Speaker dalam lomba Debat Nasional, Mahasiswa Berprestasi Agustus 2022, dan berkesempatan menjadi Moderator serta pembicara dalam Webinar Nasional

9. Arvrela Satriyani Ananda, Melinda, Armando Sitorus, Andrean Hehanusa Situmeang, Marsaor Nicoles Grosby Malau, Partogi Simanulang, Harry Claudio, Samuel Hansen, Miranda Angela dan Pasanganya, Ingrid Palmarum, Crespo Tunay, Grace Rosalinda, Menanti Debora, selaku sahabat Penulis, bersyukur mereka ada di hidup Penulis dan membuat Penulis semakin bersemangat dan hidup tidak monoton dan siap direpotkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Yehuda Revival, David Cristo, Steven Mart (NEV), Brian, terimakasih penulis ucapkan selaku tim paling berisik dalam pengerjaan skripsi ini sehingga penulis menjadi terhibur.

Jakarta, Februari 2023

(Hesti Br. Ginting)

DAFTAR ISI

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang lingkup Penelitian.....	6
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Metode Pendekatan.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	13
6. Metode Analisis Bahan Hukum.....	14
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kerangka Teoritis Dan Konsep	16

1. Kerangka Teori	16
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT TETAPI MASIH MEMPUNYAI NILAI ASET LEBIH BESAR DARI PADA UTANGNYA	57
A. Debitor Dalam Hukum Kepailitan.....	57
1. Persyaratan Kepailitan Dalam UUK-PKPU Terlalu Mudah	58
2. Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam UUK-PKPU	60
3. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam UUK-PKPU	64
B. Perdamaian dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	70
1. Urgensi Proposal Perdamaian	74
2. Perlindungan Hukum yang seharusnya terhadap Debitor yang masih Solven	77
BAB IV PENERAPAN ASAS INSOLVENSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA.	80
A. Pailit Tidak Sama Dengan Insolven	80
B. Indikator Keadaan Insolven	82
C. Makna Insolven Menurut UUK-PKPU.....	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

ABSTRAK

- A. Nama : Hesti Br Ginting
B. Nim : 1940050065
C. Program Kekhususan : Hukum Kepailitan
D. Judul : Tinjauan Yuridis Penundaan Keadaan Insolvensi dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
E. Halaman : i-xv, 95 halaman
F. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Debitor Solven, Kepastian Hukum Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan
G. Ringkasan Isi

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap Debitor yang telah dinyatakan pailit tetapi masih mempunyai nilai aset lebih besar dari pada utangnya serta penerapan asas Insolvensi dalam pembaharuan hukum Kepailitan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. Keadaan Insolvensi dari Kepailitan merupakan syarat mutlak yang seharusnya ada pada syarat-syarat Kepailitan yang ditentukan oleh UUK-PKPU, tetapi syarat Debitor dalam keadaan Insolven tidak dicantumkan sebagai syarat Kepailitan, sehingga suatu perusahaan sangat mudah untuk dinyatakan pailit.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif . Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer. Penelitian hukum normatif (*legal research*) sumber bahan hukum yang berupa Peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Teori hukum, dan pendapat para Sarjana Hukum.

Dari hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Debitor yang telah dinyatakan pailit yakni Debitor berhak mengupayakan mengakhiri Kepailitan atas dirinya dengan cara melakukan pembayaran secara berdamai dengan seluruh Kreditornya dan paling

mungkin dapat dilakukan perubahan ialah diatur mengenai limitatif atau batasan-batasan pembuktian sederhana khususnya minimal Kreditor yang akan mengajukan pernyataan pailit haruslah mempunyai batasan minimal utang Dalam hal Debitor masih dalam keadaan solven tetapi tidak membayar utangnya, Kreditor dapat mengajukan gugatan perdata biasa kepada Pengadilan Negeri. Dan kesempatan pengajuan PKPU oleh Kreditor 222 Ayat (3) menjadi pintu masuk dinyatakan Debitor dalam keadaan pailit dan Insolven, jika rencana perdamaian diusulkan dalam proses pkpu ditolak oleh para Kreditor, maka berdasarkan hal ini sangatlah tepat jika hak untuk Kreditor untuk PKPU dihapuskan.

- H. Daftar Acuan : 34 Buku+ 2 Jurnal + 3 Undang-Undang
- I. Dosen Pembimbing I : Dr.Rr Ani Wijayati, S.H.,M.Hum
- Dosen Pembimbing II : Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H.,M.H

Jakarta, 26 Januari 2023

Penulis

Hesti Br Ginting

ABSTRACT

- A. Name : Hesti Br Ginting
B. Student's Number Identity : 19.400 500.65
C. Special Program : Bankruptcy Law
D. Title : *Juridical Review Postponement of Insolvency in Law No. 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt*
E. Number of pages : i-xv, 95 Pages
F. Keywords : *Legal Protection for Solven Debtors, Legal Certainty for Insolvency*

G. Summary of Contents

This study discusses legal protection for debtors who have been declared bankrupt but still have greater asset values than their debts and the application of the principle of insolvency in renewing bankruptcy law in Indonesia in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations in Indonesia. The state of insolvency from bankruptcy is an absolute requirement that should exist in the terms of bankruptcy determined by UUK-PKPU, but the terms of a debtor in an insolvent state are not listed as bankruptcy conditions so a company is very easy to declare bankruptcy.

The research method used in this paper is normative legal research with a qualitative approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials. Normative legal research (legal research) sources of legal material in the form of statutory regulations, the Civil Code, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Debt Payment, Republic of Indonesia Law Number 4 of 1998 concerning Establishment of Regulations Government instead of Law No. 1 of 1998 concerning Amendments to the Bankruptcy Law to Become Law. Legal theory, and opinions of Law Scholars.

From the results of this study it can be concluded that legal protection for debtors who have been declared bankrupt, i.e. the debtor has the right to seek to end bankruptcy for himself by making amicable payments with all creditors and the most likely change can be made is that it is regulated regarding limitations or simple evidentiary limitations, especially at a minimum the creditor who will file a bankruptcy statement must have a minimum debt limit. If the debtor is still in a solvent state but does not pay his debts, the creditor can file an ordinary civil lawsuit with the District Court.

And the opportunity to apply for PKPU by Creditors 222 Paragraph (3) is the entry point for the Debtor to be declared insolvent and insolvent, if the peace plan proposed in the PKPU process is rejected by the Creditors, then based on this it is very appropriate if the Creditor's right to PKPU is about

- H. Reading List : 34 Books + 2 Journal + 2 Laws*
I. Supervisor I : Dr.Rr Ani Wijayati, S.H.,M.Hum
Supervisor II : Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H.,M

